

LAMPIRAN: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Pemalang
No 050.3/24/2017 Tanggal 17 April
2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 151 dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra – Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebagai Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis PD menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Jangka Menengah Pembangunan Nasional atau disebut juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun (Pasal 1 butir 7). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra – PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Pasal 25 ayat 2). Penyusunan Renstra – PD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif (Pasal 25 ayat 3).

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini digunakan pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang antara lain meliputi : pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas

(*bottom-up*). Pendekatan politik adalah proses penyusunan rencana yang mengacu pada penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati Pemalang terpilih pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode kerangka berfikir ilmiah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai satuan kerja yang secara fungsional bertugas menangani masalah-masalah Komunikasi dan Informatika. Adapun pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap masalah-masalah dalam lingkup tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain : unsur pengusaha/dunia usaha, para tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas mendasarkan pada kebijakan pemerintah pada umumnya dan masukan dari masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Penyusunan Renstra-PD menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 15 ayat 3 didasarkan pada rancangan Renstra-OPD yang disusun oleh Kepala PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya menurut pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ditegaskan bahwa rancangan Renstra-PD dipergunakan sebagai masukan dalam penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D)¹. RPJM-Daerah yang telah ditetapkan kemudian menjadi dasar bagi PD untuk menyempurnakan Renstra PD sesuai dengan RPJM-Daerah. Hasil penyempurnaan Renstra PD berdasarkan acuan atau pedoman RPJM-Daerah ditetapkan dengan peraturan pimpinan PD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Permendagri 54 Tahun 2010 bahwa Renstra PD berisi Pendahuluan; Gambaran Pelayanan PD; Isu-isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

¹Rancangan RPJM-Daerah, merupakan penyempurnaan dari Rancangan Awal RPJM-Daerah setelah memperoleh masukan dari PD dalam bentuk Rancangan Renstra PD, untuk selanjutnya menjadi bahan Musrenbang.

sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005~2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah Tahun 2013~2018 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021,
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang,

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2016 – 2021

2. Tujuan :

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan wakil bupati terpilih;

- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pemalang 2016-2021
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kab. Pemalang Tahun 2016 – 2021.
- d. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan,

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
- 2.2` Sumber Daya PD
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI MISITUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Telaah terhadap Visi Misi dalam RPJMD yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

4.3 Strategi dan Kebijakan PD

4.5. Rencana Program dan Kegiatan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik,

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, bahwa kewenangan desentralisasi yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah :

- a. bidang komunikasi dan informatika.

- b. Bidang persandian.
- c. Bidang statistik

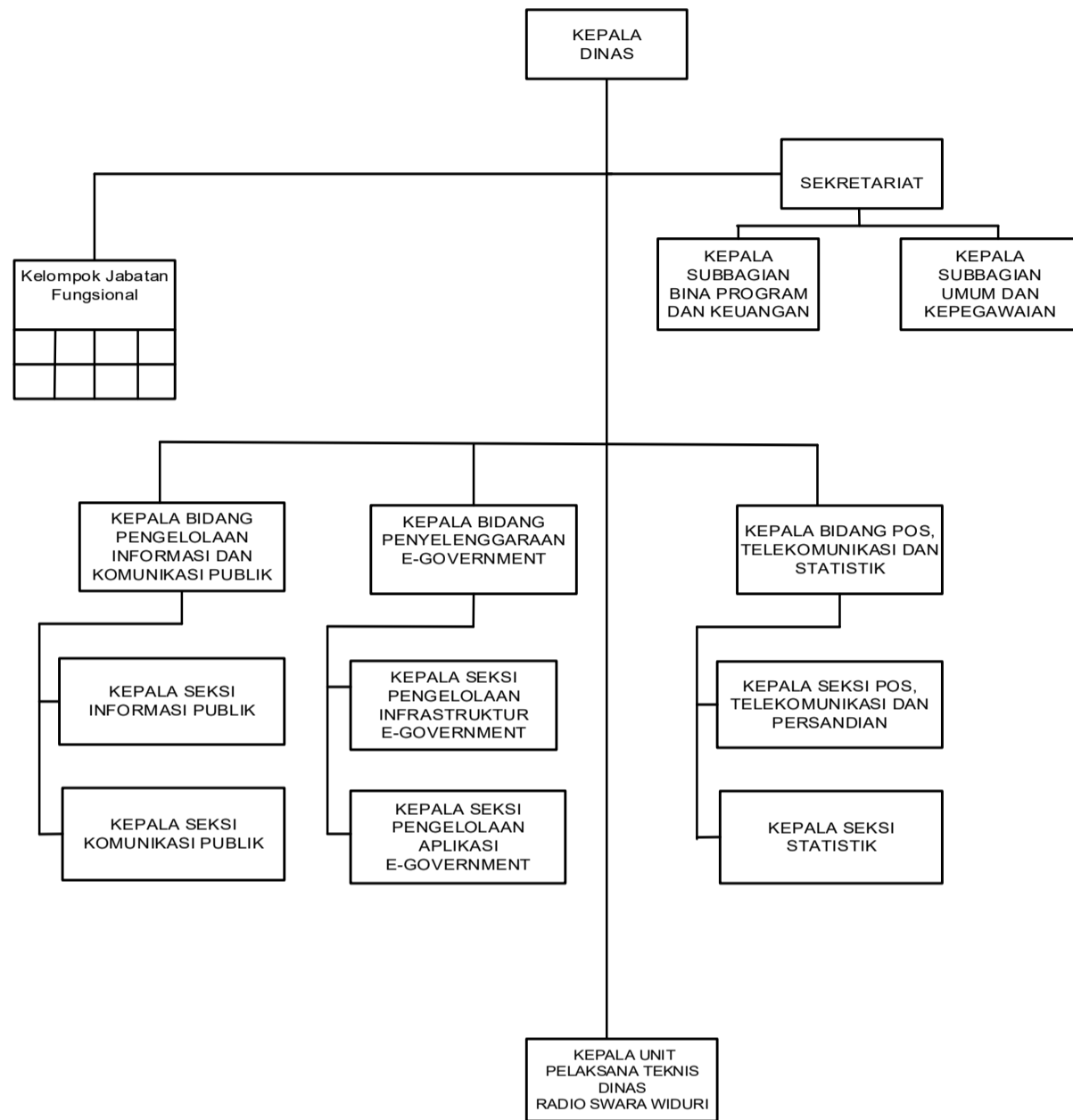
4. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada Bagian Ketiga, menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat terdiri dari
 - 1. Subbagian Bina Program dan Keuangan,
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian,
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari
 - 1. Seksi Informasi Publik,
 - 2. Seksi Komunikasi Publik,
- d. Bidang Penyelenggaraan *E-Government* terdiri dari
 - 1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government*,
 - 2. Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government*,
- e. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik terdiri dari
 - 1. Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian;
 - 2. Seksi Statistik,
- f. UPTD,
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

LAMPIRAN ---
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR 13 TAHUN 2016
 TANGGAL 22 AGUSTUS 2016

SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN PEMALANG



NB. Dasar pembuatan
 1. FGD di surakarta
 2. Perumpunan Urusan dan Urgut
 berdasarkan pp 18/2016

BUPATI PEMALANG,

 JUNAEDI

Uraian Tugas Pejabat Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Diskominfo

Kepala Diskominfo mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
2. merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
5. merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
6. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
7. mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi,
8. mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
9. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

10. merumuskan laporan di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

B. Sekretaris

Sekretaris Diskominfo mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. mengkoordinasikan usulan Rencana Strategic (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemenntah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. menyusun rancangan kebijakan kesekretanatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
5. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
6. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) urusan pemenntahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,
7. menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
8. mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
9. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretanatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
10. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan mformatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan basik laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- 1) merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2) menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
- 3) melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi,
- 4) mengelola data urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah guna pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
- 5) melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan,
- 6) menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan panduan pembuatan laporan sebagai bahan pertanggungjawaban,
- 7) menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi,
- 8) menyiapkan bahan inovasi Subbagian Bina Program dan Keuangan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,
- 9) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,
- 10) mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 11) menyusun bahan laporan urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

- 12) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- 1) merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2) mengelola administrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
- 3) mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
- 4) mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor, fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas, dan barang milik daerah secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
- 5) mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja sesuai dengan target kerja guna kelancaran pelaksanaan tugas,
- 6) mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib administrasi,
- 7) melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
- 8) menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- 9) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 10) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

C Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) merencanakan program dan kegiatan Bidang Informasi Publik dan Komunikasi Publik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2) menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Informasi Publik dan Komunikasi Publik sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3) menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Informasi Publik dan Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
- 4) menyusun konsep inovasi urusan pemerintah bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- 5) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara periodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
- 6) mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 7) menyusun laporan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 8) melaksanakan tugas kedinasian lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a Kepala Seksi Informasi Publik

Kepala Seksi Informasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai Berikut

- 1) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Informasi Publik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2) menyusun konsep rancangan program dan kegiatan pada Seksi Informasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3) menyusun rancangan kebijakan Seksi Informasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 4) menyusun konsep rancangan Rencana Induk Strategi Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
- 5) melaksanakan. pengelolaan informasi publik serta hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah sesuai prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas saluran informasi publik serta hubungan masyarakat dengan Pemerintah Daerah,

- 6) melaksanakan kegiatan reproduksi informasi nasional sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan keselarasan antara informasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- 7) melaksanakan kegiatan pelayanan, fasilitasi dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik,
- 8) melaksanakan diseminasi informasi nasional sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyebaran informasi,
- 9) melaksanakan pengelolaan pemutakhiran materi dan konten situs Pemenntah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna pemutakhiran informasi publik,
- 10) melaksanakan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyebarluasan informasi,
- 11) menyusun rancangan inovasi Seksi Informasi Publik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- 12) mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Informasi Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 13) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Informasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b Kepala Seksi Komunikasi Publik

Kepala Seksi Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- 1) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2) menyusun rancangan kebanyakan Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3) menyusun konsep rancangan Rencana Induk Strategi Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
- 4) melaksanakan pengelolaan komunikasi publik serta hubungan masyarakat Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektivitas saluran komunikasi publik serta hubungan masyarakat Pemerintah Daerah,

- 5) melaksanakan kegiatan audit komunikasi publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mengontrol komunikasi publik,
- 6) melaksanakan kegiatan kemitraan komunikasi dengan media sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan kerjasama,
- 7) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya komunikasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan kapasitas,
- 8) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah maupun masyarakat sesuai dengan prosedur teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya TIK,
- 9) melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna efektifitas dan efisiensi komunikasi publik,
- 10) melaksanakan kegiatan pembinaan saluran komunikasi non pemerintah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pengelolaan saluran komunikasi non pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
- 11) melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan komunikasi sosial sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan komunikasi sosial,
- 12) menyusun rancangan inovasi Seksi Komunikasi Publik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- 13) mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 14) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

D. Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government*

Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* dan Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kinerja dan anggaran,
- 2) menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* dan Pengelolaan Aplikasi *E-*

- Government* sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3) menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur E-Government dan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
 - 4) menyusun konsep inovasi urusan pemerintah Bidang Penyelenggaraan *E-Government* sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
 - 5) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E-Government* secara periodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
 - 6) mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E-Government* sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
 - 7) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E-Government* secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
 - 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenarkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government*

Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. menyusun rancangan kebijakan Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. menyusun konsep rancangan Rencana Induk *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
4. melaksanakan pengelolaan *E-Government* Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola *E-Government* yang baik,
5. melaksanakan pengelolaan infrastruktur dasar Pusat Data (Data Center), *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informatika dan Komputer (TIK) Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan standar minimal penyelenggaraan *E-Government*,
6. melaksanakan pengelolaan intranet Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan komunikasi data yang baik antar perangkat daerah,
7. menyiapkan penyediaan layanan akses internet dan intranet sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyebaran akses informasi,

8. melaksanakan pengembangan infrastruktur teknologi dan komunikasi komputer (TIK) sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung pengembangan *E-Government*,
9. melaksanakan kegiatan penyusunan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna. penyalarsan sumber daya teknologi dan komunikasi komputer (TIK) Pemermtah Daerah,
10. menyusun rancangan inovasi Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekeijaan dan memngkatkan kualitas pelayanan publik,
11. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
12. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b. Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government*

Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* mempunyai uraiantugas sebagai berikut:

- 1) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana keija dan anggaran,
- 2) menyusun rancangan kebijakan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3) menyusun konsep rancangan Rencana Induk *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
- 4) melaksanakan pengelolaan nama domain dan sub domain situs Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyalarsan dengan ketentuan Pemerintah Pusat,
- 5) melaksanakan pengelolaan interoperabilitas dan interkoneksi aplikasi dan database *E-Government* Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan *E-Government*,
- 6) melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah Daerah yang terintegrasi,

- 7) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aplikasi genenk, spesifik dan suplemen sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan mtegrasi aplikasi,
- 8) melaksanakan pengelolaan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan *Smart City*,
- 9) melaksanakan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola *E-Government* yang baik,
- 10) melaksanakan pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi publik yang baik,
- 11) melaksanakan pengelolaan aplikasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara elektronik (e-LPPD) sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan pelaporan,
- 12) menyusun rancangan inovasi di lingkungan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- 13) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 14) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

E. Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik

Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik mempunyai uraian Tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan bidang Pos, Telekomunikasi dan Persandian serta bidang Statistik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. menyusun konsep rancangan kebijakan bidang Pos, Telekomunikasi dan Persandian serta bidang Statistik sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian serta Seksi Statistik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,

4. menyusun konsep inovasi urusan pemerintah Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik secara periodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian

Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut

1. merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. menyusun rancangan kebijakan Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. menyusun konsep rancangan Rencana Induk Pola Hubungan Komunikasi Sandi dan Pengamanan Informasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
4. melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap penyelenggaraan standardisasi dan penzaman pos dan telekomunikasi di daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna pemngkatan pelayanan publik;
5. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan hubungankomunikasi sandi dan pengamanan mformasi yang bersifat lokal sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan guna peningkatan pengetahuan dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pos, telekomunikasi danpersandian,
6. melaksanakan pengelolaan keamanan mformasi *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan untuk mewujudkan keamanan komunikasi data Pemerintah Daerah,
7. melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah,

8. mengoordinasikan penetapan, pemberlakuan dan penghapusan kunci sistem sandi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk pengamanan,
9. melaksanakan kegiatan tata kelola dan perlindungan informasi berklasifikasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk pengamanan informasi,
10. melaksanakan kegiatan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi, Matriil Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) baik melalui asistensi, workshop, pelatihan, seminar dan/atau bimbingan teknis persandian sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk peningkatan kualitas kerja
11. melaksanakan pengelolaan pusat data persandian sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna ketersediaan informasi publik
12. melaksanakan kegiatan pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan tingkat keamanan informasi secara internal pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjaga informasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah,
13. melaksanakan pengelolaan materil, sarana, prasarana dan infrastruktur persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada Peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
14. melaksanakan pelayanan satu pintu penginman dan penerimaan informasi berklasifikasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk efektivitas pelaksanaan kerja,
15. mengelola kegiatan pemulihan data dan gangguan jaringan sistem informasi dengan menjaga integritas dan ketersediaan data,
16. mengelola Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna perlindungan data,
17. menyusun rancangan motivasi Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
18. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
19. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b Kepala Seksi Statistik

Kepala Seksi Statistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1 menyusun konsep rancangan program dan kegiatan pada Seksi Statistik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 2 menyusun rancangan kebijakan Seksi Statistik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 3 mengidentifikasi data, dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan survey pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk keterpaduan data dalam pelaksanaan survey,
- 4 menyusun metode survey dan petunjuk teknis pelaksanaan survey sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh hasil survey yang akurat,
- 5 melakukan konsultasi dan mengkoordinasikan persiapan penyelenggaraan survey pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan,
- 6 melaksanakan kegiatan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh data statistik sektoral yang valid dan akurat,
- 7 menyusun data hasil survei pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan untuk diolah menjadi laporan hasil survey,
- 8 mempersiapkan bahan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan kegiatan survei maupun kebijakan pada masa akan datang,
- 9 mengidentifikasi konsep pengembangan metodologi survei, diseminasi statistik dan sistem informasi pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka meningkatkan mutu data statistik,
- 10 menyusun rancangan inovasi Seksi Statistik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- 11 mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Statistik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 12 menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Statistik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 13 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Sumber Daya Manusia

Per 01 Maret 2017, Personil pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan struktur :

1) Jumlah Struktural :

- a) Eselon II/B : 1 orang
- b) Eselon III/A : 1 orang
- c) Eselon III/B : 3 orang
- d) Eselon IV/A : 8 orang

2) Jumlah Pelaksana :

- Pelaksana : 31 orang

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang, terdiri dari :

- 1) Pembina Tingkat I (IV/b) : 2 orang
- 2) Pembina (IV/a) : 2 orang
- 3) Penata Tingkat I (III/d) : 6 orang
- 4) Penata (III/c) : 1 orang
- 5) Penata Muda Tingkat I (III/b) : 14 orang
- 6) Penata Muda (III/a) : 5 orang
- 7) Pengatur Tingkat I (II/d) : 1 orang
- 8) Pengatur (II/c) : 6 orang
- 9) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 5 orang
- 10) Pengatur Muda (II/a) : 2 orang
- 1) Sarjana Strata 2 : 2 orang
- 2) Sarjana Strata 1/Diploma IV : 17 orang
- 3) Diploma III : 1 orang
- 4) SLTA : 24 orang

c. Sedangkan Tenaga/Pegawai Honorer pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- 1) Petugas fotografer : 1 orang
- 2) Petugas Kantor : 2 orang

3) Petugas Penyiar Radio: 7 orang

Dari keseluruhan pegawai (PNS) sebanyak Apabila dilihat dari struktur kepangkatan dan tingkat pendidikan, maka SDM Dinas Komunikasi dan Informatika sangat representatif, dimana 68 % pegawai bergolongan III dan IV, dan 45% pendidikan Sarjana SI dan S2, 55% berpendidikan SLTA.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik, kinerja aparat/ petugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang didukung dengan adanya sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana tersebut diantaranya Studio Radio Swara Widuri, dan peralatan kamera dan tustel, server, mobil M Pustaka, dan laboratorium komputer. Selain itu juga beberapa set komputer sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran. Sedangkan prasarana yang ada berupa Gedung Kantor Pelayanan Administrasi, dan Gedung LPPL Swara Widuri.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika didukung sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang ;

No	Jenis	Jumlah
1	Komputer	15 unit
2	Laptop	6 unit
3	LCD	2 unit
4	Telepon	3 unit
	Mesin Fax	unit
	Instalasi Telepon, Fax, PABX	2 unit
5	Televisi	3 buah

6	AC	14 buah
7	Almari	26 buah
8	Meja Kerja Eselon II	1 buah
9	Meja dan Kursi Kerja	61 buah
10	Kursi Rapat	62 buah
11	Meja dan Kursi Tamu	3 set
12	Mesin Tik	2 buah
13	Filling Cabinet	16 buah
14	Kendaraan Roda-4	3 buah
15	Kendaraan Roda-2	3 buah
16	Tape Recorder/Wireless	10 buah
18	Kamera Digital	3 buah
19	Pesawat HT + Rig	2 unit
20	Kamera drone	1 unit
21	Video switcher	1 unit
22	Megaphone	1 unit
23	HP/notebook	4 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu dinas daerah yang mempunyai tugas pokok "*Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik*", oleh karena itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya harus memberikan pelayanan umum sebaik-baiknya kepada masyarakat baik pelayanan administratif maupun pelayanan-pelayanan teknis guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

1. Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, pelayanan yang dapat diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya meliputi :

1. Jumlah Pelaksanaan Desiminasi Informasi Nasional melalui:
 - a. Media Massa seperti majalah, koran,radio dan televisi
 - b. Media baru seperti website (media on line)
 - c. Media tradisional seperti media pertunjukan rakyat
 - d. Media interpersonal seperti ceramah, sarasehan, diskusi dan lokakarya
 - f. Media Luar Ruang seperti buletin, spanduk, leaflet, baliho, brosur.

2. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat.

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dan ditetapkannya PD baru secara serentak di Indonesia, saat ini Kementrian Kominfo bersama dengan Kementrian Dalam Negeri tengah menyusun draft SPM yang baru, dan masih dalam tahap harmonisasi.

Hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kominfo antara lain sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang berupa :

- 1) Tersedianya *website* (media online) yaitu www.pemalangkab.go.id.
- 2) Media tradisional.
- 3) Media luar ruang seperti leaflet, poster, spanduk dan sarana publikasi lainnya.

Saat sekarang ini telah ada sarana pendukung untuk kegiatan diseminasi informasi adalah kendaraan m-pustaka (mobil pusat teknologi informasi dan komunitas) yang merupakan hibah dari pemerintah pusat.

b. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah fasilitasi dan forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Upaya percepatan penerapan *e-government*, Pemerintah Kabupaten Pemalang, Dinas Komunikasi dan Informatika telah memiliki sarana dan prasarana Teknologi Informasi, yang merupakan aset dari Dinas sebelumnya yakni Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Humas antara lain :

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	JENIS	JUMLAH
1	Pusat Pengendali Jaringan (NOC)	1 unit
2	Laboratorium Komputer	1 ruang
3	Infrastruktur jaringan : - Hot spot - Jaringan kabel di lingkungan sekretariat	5 titik 1 unit
4	Sarana komunikasi multimedia	21 buah
5	Standing tower (70 M)	1 unit
6	Standing trianggel (30M)	1 unit
7	Perlengkapan multimedia : - Screen - Proyektor - Peralatan audio - Alat komunikasi radio	4 unit 7 unit 3 unit 11 unit
8	Peralatan dan Ruang Media Center	7 unit

Selain berdasarkan SPM sebagai standar pelayanan minimal, juga terdapat Indikator Kinerja Kunci sebagai acuan keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau

kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat 6 (enam) IKK yang berkaitan dengan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yakni:

- a) Jumlah jaringan komunikasi
- b) Rasio wartel/warnet-terhadap penduduk
- c) Jumlah surat kabar nasional/lokal
- d) Jumlah penyiaran radio/TV lokal
- e) Adanya Buku Kabupaten dalam Angka
- g) Jumlah pameran/expo

Dan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021, telah ditetapkan Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut:

1. Terbangunnya hotspot area di RTH kecamatan

Adapun indicator program yang tercantum dalam RPJMD antara lain:

1. Tersedianya DATA CENTER di Kabupaten Pematang
2. Jumlah Penyiaran Radio/Jumlah pengawasan isi siaran Radio
3. Cakupan layanan BTS
4. Persentase SKPD telah memiliki website
5. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat di Kabupaten Pematang.
6. Jumlah Pelaksanaan Desiminasi Informasi Nasional melalui
 - a. Media Massa seperti majalah, koran,radio dan televisi
 - b. Media baru seperti website (media on line)
 - c. Media tradisional seperti media pertunjukan rakyat
 - d. Media interpersonal seperti ceramah, sarasehan, diskusi dan lokakarya

e. Media Luar Ruang seperti buletin, spanduk, leaflet, baliho, brosur.

2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penetapan rencana tingkat capaian (target) yang merupakan gambaran mengenai kinerja diinginkan. Penggunaan kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa **Formulir PKK** (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan **Formulir PPS** (Pengukuran Pencapaian Sasaran).

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2015, dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2011-2015, serta Renstra Bappeda Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2011-2015, untuk Tahun 2011-2015 telah ditetapkan 6 (enam) sasaran dengan melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang direncanakan sebagai bagian dari Rencana Strategis Tahun 2011 - 2015 untuk mencapai (6enam) sasaran tersebut.

Capaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Bagian Humas Sekretariat Daerah dan Bappeda Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2011 - 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD
 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, Bagian Humas Setda dan Bidang Litbang dan Stalappada Bappeda

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi PD	Target sesuai Indikator			Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Persentase Capaian Tahun ke-				
		SPM	IKK	Lainnya	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Urusan Komunikasi dan Informatika																		
1	Jumlah jaringan komunikasi		20		12	14	16	17	18	12	14	16	17	18	100	100	100	100	100
2	Ratio Wartel/Warnet terhadap penduduk		0,01		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100	100	100	100	100
3	Jumlah Surat Kabar Nasional/lokal		36		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	100	100	100	100	100
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (10)		10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100
5	Website milik pemerintah daerah		Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
6	Pameran/expo		23		23	23	23	23	23	23	23	23	23	0	100	100	100	100	100

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, Bagian Humas Setda dan Litbang dan Stalappada Bappeda

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke (jutaan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Jutaan)					Persentase Realisasi Ratio antara realisasi dari anggaran (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Urusan Komunikasi dan Informatika															
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	27.200.000	18.750.000	51.800.000	229.200.000	176.000.000	26.636.895	18.594.560	47.849.500	218.641.890	164.816.500	98	99	92	95	94
2	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi			39.000.000	77.575.000				35.611.736	61.914.250				91		80
3	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	302.190.000	255.150.000	471.300.000	416.500.000	903.600.000	198.838.910	246.734.614	439.101.009	334.958.932	813.199.650	66	97	71	80	90
4.	Program Penguatan kelembagaan dalam Pengelolaan komunikasi dan informasi				43.225.000	131.500.000				36.030.250	124.471.250				83	95
5.	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	95.897.000	166.700.000	277.300.000	732.400.000	922.150.000	91.098.570	157.786.923	232.184.319	657.090.590	839.975.459	95	95	84	90	91
	URUSAN STATISTIK															
6	Program pengembangan Informasi/Statistik Daerah															

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Kekuatan

- a. Tersedianya regulasi Pengelolaan Informasi Publik
- b. Tersedianya rintisan penerapan E-Government di Kabupaten Pemalang
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
- d. Tersedianya unit organisasi yang sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika
- e. Tersedianya media informasi milik Pemerintah Kabupaten Pemalang
- f. Tersedianya anggaran yang cukup memadai

2. Kelemahan

- a. Belum tercukupinya kebutuhan aparatur yang kompeten di bidang komunikasi dan informatika
- b. Belum meratanya akses jaringan komunikasi antar SKPD/OPD
- c. Belum tersedianya Daftar Informasi Publik sesuai Undang-undang KIP
- d. Belum seluruh Aparatur Sipil Negara memiliki pemahaman yang benar mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- e. Belum adanya integrasi antar aplikasi yang digunakan oleh masing-masing SKPD/OPD
- f. Distribusi beban tugas tidak sesuai dengan proporsinya di masing-masing bidang
- g. Tidak adanya roadmap pengembangan komunikasi dan informatika untuk mendukung penerapan E-Government di Kabupaten Pemalang

3. Peluang

- a. Komitmen pimpinan daerah untuk melakukan akselerasi penerapan E-Government di Kabupaten Pemalang
- b. Adanya jaringan relawan TIK pusat yang telah bergerak mengembangkan TIK di desa-desa.
- c. Regulasi/peraturan yang mengatur pengembangan TIK, informatika (telematika), Open Source.
- d. Pelatihan SDM untuk tenaga TIK di masing-masing OPD/SKPD.
- e. Optimalisasi persandian untuk pengamanan informasi
- f. Tersedianya Data statistik sektoral

4. Tantangan

- a. Tuntutan masyarakat akan akses pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau.
- b. Menurunnya peringkat Kabupaten Pemalang dalam Keterbukaan Informasi di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Akan diberlakukannya Indeks PEGI dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu tolok ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan.
- d. Masih lebarnya kesenjangan TIK masyarakat.
- e. Jaminan keamanan sistem TIK.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka untuk mewujudkan peningkatan kualitas kinerja pembangunan di Lingkungan Diskominfo Kabupaten Pemalang diperlukan suatu kondisi yang baik yang dapat menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan yang tertib, pengelolaan administrasi keuangan yang benar, pengadaan sarana dan prasarana serta program prioritas sesuai dengan ketentuan dan kualitas SDM aparatur yang semakin meningkat.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Secara umum permasalahan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Pemalang tidak banyak berbeda dengan daerah lain. Permasalahan pada umumnya menyangkut infrastruktur, aksesibilitas, isu lingkungan, pelayanan, efisiensi dan efektivitas, dan kesenjangan pelayanan serta prasarana antar wilayah. Secara rinci permasalahan-permasalahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik adalah sebagai berikut:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. belum meratanya akses masyarakat terhadap informasi;
- b. masih kurangnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
- c. belum meratanya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat terhadap teknologi informasi.
- d. belum adanya regulasi pengembangan E-Government Pemerintah Kabupaten Pemalang
- e. belum terintegrasinya data sistem elektronik pemerintah Kabupaten Pemalang
- f. belum terintegrasinya pengelolaan aplikasi di lingkungan SKPD/OPD Pemerintah Kabupaten Pemalang

2. Urusan Persandian

- a. Masih kurangnya kesadaran keamanan informasi pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara;
- b. Adanya kerawanan dan ancaman perusakan sistem komunikasi elektronik, aplikasi server dan data center;
- c. Adanya kerawanan dan ancaman keamanan jaringan komunikasi pejabat negara dan OPD Pemerintah Kabupaten Pemalang
- d. Terbatasnya fasilitas peralatan persandian.

3. Urusan Statistik

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat arti pentingnya data;
- b. Terbatasnya/sulitnya akses data pembangunan;
- c. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data statistik sektoral.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Visi Kabupaten Pemalang untuk lima tahun ke depan adalah :

“ Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera.”

Penjelasan Visi :

Dalam visi tersebut di atas terdapat empat gagasan pokok yang menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pemalang, yaitu :

- a. **Pemalang Hebat**, Terwujudnya Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan menjadi ada. Pemalang Hebat merupakan *ultimate goal* yang dicita-citakan dan yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera. **Pemalang Hebat** juga menjadi *tagline* pembangunan daerah dalam memacu semangat, percepatan dan sinergitas para *stakeholders* terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang.
- b. **Berdaulat** diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengantetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum.
- c. **Berjatidiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis *local wisdom/local value* dengan

menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.

- d. **Mandiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal.
- e. **Sejahtera** diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Misi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Bupati Pemalang. Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung keseluruhan Misi Kabupaten Pemalang.

Pencapaian Visi "Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjati diri, Mandiri dan Sejahtera", ditempuh melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah, mufakat dan gotong royong
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak
- c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran

- d. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar yang merata serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan daya saing daerah
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati
- f. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum kemudahan investasi dan daya saing daerah
- g. Menumbuhkan kembali Budaya Asli Daerah Kabupaten Pemalang sebagai landasan pembentukan jati diri Pemalang untuk memperkokoh kepribadian bangsa

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Perumusan program pembangunan daerah merupakan inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan startegis pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas.

Program pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Kabupaten Pemalang yang berisi program prioritas yang bersifat strategis, yang terdiri dari:

1. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan
2. Pendirian Rumah Sakit Pratama di Comal dan Randudongkal
3. Pembangunan Kawasan Wisata
 - a. Mangrove di Mojo Ulujami
 - b. Pengembangan Wisata Susur Sungai Comal
 - c. Pemandian Moga, dengan infrastruktur pendukung.
 - d. Desa Wisata (Cikendung, Sikasur, Gombong, Banyumudal, Sima, Kaliprau, Mojo, Pegongsoran, Penggarit, Nyamplungsari, Blendung, Kertosari, Pedagung, dan Desa Surajaya)
 - e. Pembangunan Wisata Edukasi Gardu Pandang Gunung Slamet

4. Pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu
5. Pengembangan Agropolitan:
 - a. Agropolitan Durian (Warungpring),
 - b. Agropolitan Mangga Istana (Asem Doyong, Penggarit, Widuri, Danasari)
 - c. Nanas (Waliksarimadu)
6. Budidaya Padi Teknologi Salibu (Ampelgading)
7. Pengembangan Minapolitan
 - a. Tasikrejo, Kaliprau, Ketapang, Mojo, Pesantren, Limbangan (Kec. Ulujami)
 - b. Lawangrejo, Sugihwaras (Kec. Pemalang)
8. Pengembangan Kawasan Pedesaan (Waliksarimadu)
9. Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kerbau di Desa Peguyangan, Kec. Bantarbolang dan SPR Sapi Potong di Kecamatan Watukumpul dan Belik.
10. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan di Desa Nyamplung Sari dan Mojo
11. RTH di masing-masing Kecamatan dengan kelengkapan *Hotspot area*.
12. Pengembangan Peternakan di Kawasan Penghasil Telur Omega (Klarean, Sarwodadi)
13. Pembangunan pasar pagi dan pasar unggas.
14. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
15. Pengembangan BLK dan Pembangunan Technopark
16. Pembangunan Masjid Agung Pemalang
17. Revitalisasi Pasar-pasar daerah
18. Pembangunan jalan-jalan beton (*Rigid Pavement*)
19. Penataan Ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
20. Pembangunan PLTU Kabupaten Pemalang
21. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
22. Pembangunan Pusat Pengembangan Informatika dan Desa (PUSPINDES)
23. Pembangunan Bandara Perintis.
24. Pembangunan Gedung DPRD
25. Pembangunan Rumah Budaya
26. Penyediaan Air Bersih

27. Pembangunan *Sport Centre*

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Bupati Pemalang. Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pencapaian visi dan keseluruhan Misi Kabupaten Pemalang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Pemalang 2016-2021, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan ***misi yang ke 1 (satu)*** yaitu *Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah, mufakat, dan gotong royong* dan ***misi yang ke 6*** (Enam) yaitu *Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan supermasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah*.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang, dinas Komunikasi dan Informatika melalui program

1. Progam Fasilitasi Peningkatkan SDM bidang Komunikasi dan Informasi.
2. Progam Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah.
3. Progam Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informasi.
4. Progam Kerjasama Informasi dengan Media Massa.
5. Progam Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah .
6. Program Pengembangan Persandian/Informasi Daerah.
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
10. Progam Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
11. Progam Peningkatan Displin Aparatur.
12. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

1. Telaah Renstra Kementrian

a. Kementerian Komunikasi dan Informasi

Visi Kementerian Komunikasi dan Informasi 2015-2019 adalah

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya sejalan dengan tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni tujuan ke: (2.) Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman; ke (4). Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi; ke (5). Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing; ke (6). Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan ke (7). Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

2. Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Tengah.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah "Profesional, Inovatif Guna mewujudkan Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang handal Terjangkau, transparan, Terintegrasi dan Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 8 delapan misi yakni:

1. Peningkatan kapasitas pelayanan komunikasi informasi serta kerjasama kemitraan untuk mewujudkan masyarakat berbasis informasi.
2. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
3. Mengembangkan kebijakan pengaturan pengawasan pengembangan isi siaran
4. Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap struktur sistem siaran dan profesionalisme penyiaran.
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
6. Mewujudkan satu data informasi guna pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.
7. Peningkatan integrasi sistem dalam rangka perwujudan smart province.
8. Peningkatan Infrastruktur Teknologi dalam rangka penerapan data center.

Keterkaitan antara Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat digambarkan dalam diagram seperti di bawah ini.



Berdasarkan analisa terhadap Renstra kementerian Komunikasi dan Informatika 2015-2019, Draft Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 maka dapat ditelaah sebagai berikut :

- a. Kontribusi capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang terhadap pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019

Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mempunyai kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan Jawa Tengah dan juga berimplikasi pada pelaksanaan pembangunan nasional.

- b. Posisi tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang terhadap sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019

Secara posisi capaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Terhadap sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sama. Hal ini terjadi karena capaian kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi Kabupaten Pemalang mensupport tercapainya sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019. Seperti dapat diketahui bahwa sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang memiliki kesamaan yang mendekati sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yakni "Memperkuat partisipasi

masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak” dan sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni “mewujudkan masyarakat maju berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

RTRW Kabupaten Pematang Jaya yang sudah ditetapkan akan mengarah pembangunan di Kabupaten Pematang Jaya dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna berhasil guna serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Strategis Kabupaten Pematang Jaya, yang berkaitan langsung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya adalah Pengembangan Kebijakan Kewilayahan dengan pengembangan prasarana daerah strategis yaitu meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi. Dari kebijakan tersebut maka langkah yang akan ditempuh adalah Peningkatan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (internet masuk desa) dengan Lokasi pedesaan yang jauh dari jangkauan layanan internet, di Lokasi Ruang Terbuka Hijau dan bagi Kecamatan yang belum ada Ruang Terbuka Hijau akan mencari lokasi yang oleh masyarakat atau pengambil kebijakan merupakan tempat yang sering dikunjungi masyarakat karena aman, teduh, nyaman dan rindang atau yang lain di masing-masing Kecamatan dengan kelengkapan Hotspot area, dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis, Memuat Faktor-faktor dari Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan PD

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan birokrasi pemerintahan daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan, ada beberapa permasalahan pada pelayanan wajib Diskominfo yang sesuai analisa isu isu strategis dapat diidentifikasi antara lain:

1. Belum semua SKPD dan Kelurahan serta desa terjangkau jaringan komunikasi, saat ini baru 40 SKPD yang baru terjangkau;

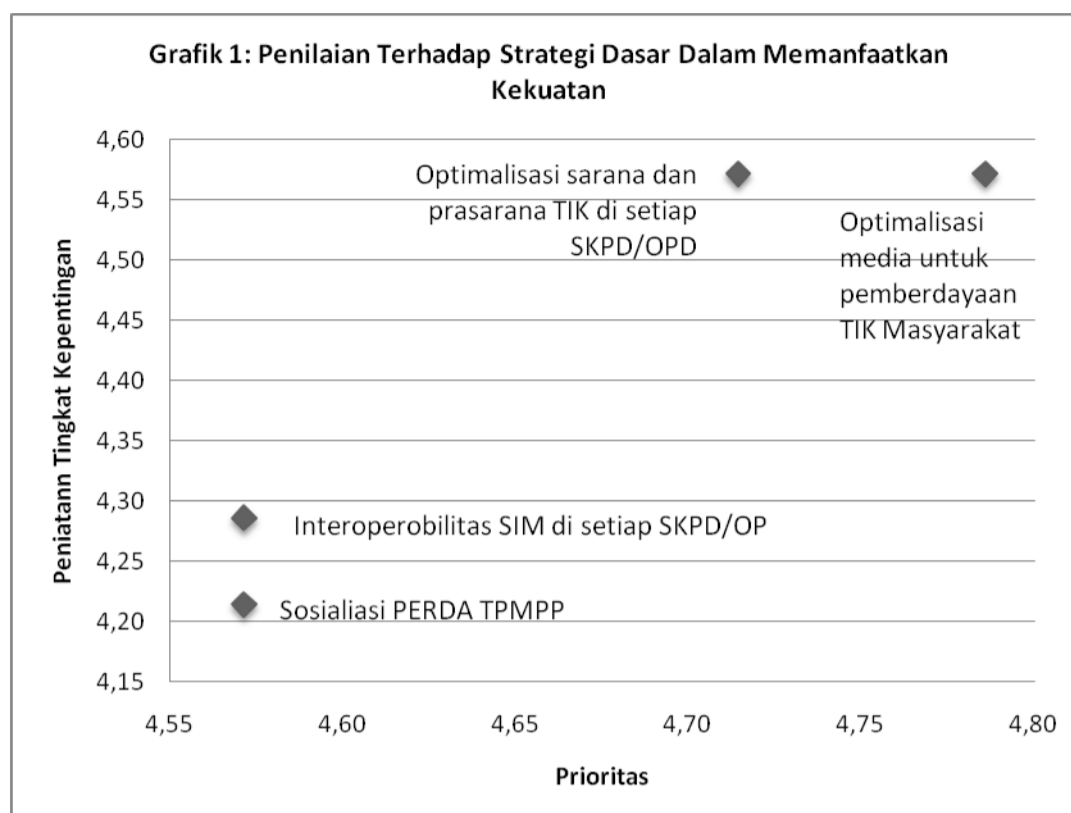
2. Belum semua SKPD memiliki website sendiri yakni baru 80% saja. Sedangkan SKPD yang telah memiliki website juga belum optimal dapat mengelola dengan baik, karena kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TI.
3. Belum semua wilayah Kabupaten Pemalang dapat terjangkau jaringan komunikasi karena masih terbatasnya BTS baru 70%.
4. Keterlambatan penyediaan data statistik yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan.
5. Jumlah SDM dan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kriptografi masih terbatas.

Maka untuk bisa mengatasi permasalahan perlu dikembangkan strategi sebagai berikut :

1. Strategi dasar untuk mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah :
 - a. Sosialisasi dan implementasi Perda No 1 tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Pemalang beserta peraturan pelaksanaannya kepada SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan stake holders.
 - b. Menumbuh kembangkan serta mengintegrasikan rintisan E Government di seluruh SKPD/OPD.
 - c. Optimalisasi dan maksimalisasi sarana dan prasarana TIK.
 - d. Optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan media informasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - e. Optimalisasi anggaran yang tersedia untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sasaran.

Dalam memanfaatkan kekuatan, harus dilakukan secara bersama dan sinergis. Hasil analisis tingkat kepentingan dan tingkat kemendesakan (prioritas) menunjukkan bahwa antara tingkat kepentingan dan prioritas skornya berada dipandang sama-sama penting dan mendesak. Diagram

Kartesian di bawah ini mengindikasikan perlunya mengoptimalkan kekuatan secara bersama-sama dan saling sinergi²

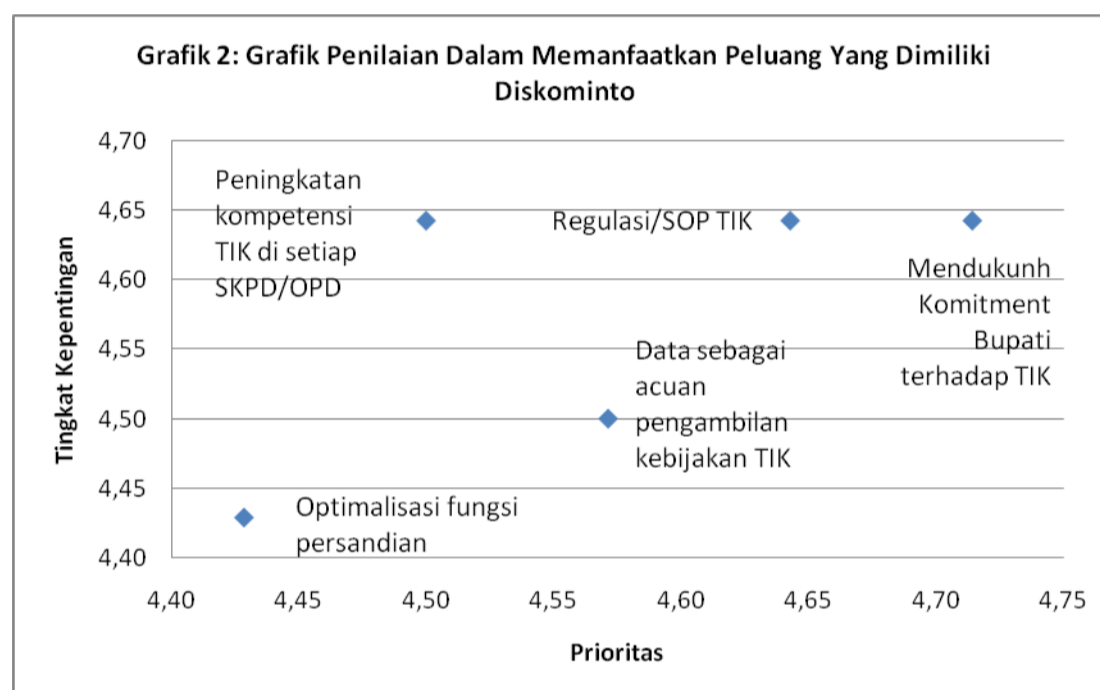


2. Strategi dasar untuk memanfaatkan Peluang yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan institusionalisasi komitmen pimpinan daerah kepada seluruh OPD/SKPD untuk melakukan akselerasi penerapan E-Government di Kabupaten Pemalang.
 - b. Menyusun kebijakan terkait dengan Regulasi/peraturan yang mengatur pengembangan TIK, informatika (telematika), Open Source.

² Dialolah dari hasil kuisisioner terhadap judgment sample yang terdiri dari akademisi, praktisi TIK, Praktisi Komunikasi Publik, legislative, eksekutif dan relawan TIK di Kab Pemalang. Garis vertikal (Y) merupakan persepsi responden terhadap tingkat kepentingan dan Garis horisontal (X) merupakan persepsi terhadap kebutuhan (prioritas). Kuisisioner dibuat dengan menggunakan Likert.

- c. Peningkatan kapasitas kompetensi dengan pelatihan tenaga TIK di masing-masing OPD/SKPD.
- d. Mengoptimalkan peran dan fungsi persandian untuk pengamanan informasi.
- e. Penyediaan Data dan statistik sektoral sebagai acuan penyusunan kebijakan dan publikasi informasi daerah.

Grafik 2³ mengindikasikan untuk memanfaatkan peluang maka yang penting dan menjadi prioritas untuk dilakukan adalah mendukung komitmen Bupati Pematang, menyusun regulasi dan SOP TIK, data sebagai basis pengambilan kebijakan dan publikasi informasi daerah, peningkatan kompetensi aparatur TIK di SKPD dan OPD serta untuk pengamanan informasi, fungsi dan peran persandian niscaya untuk dioptimalisasikan.

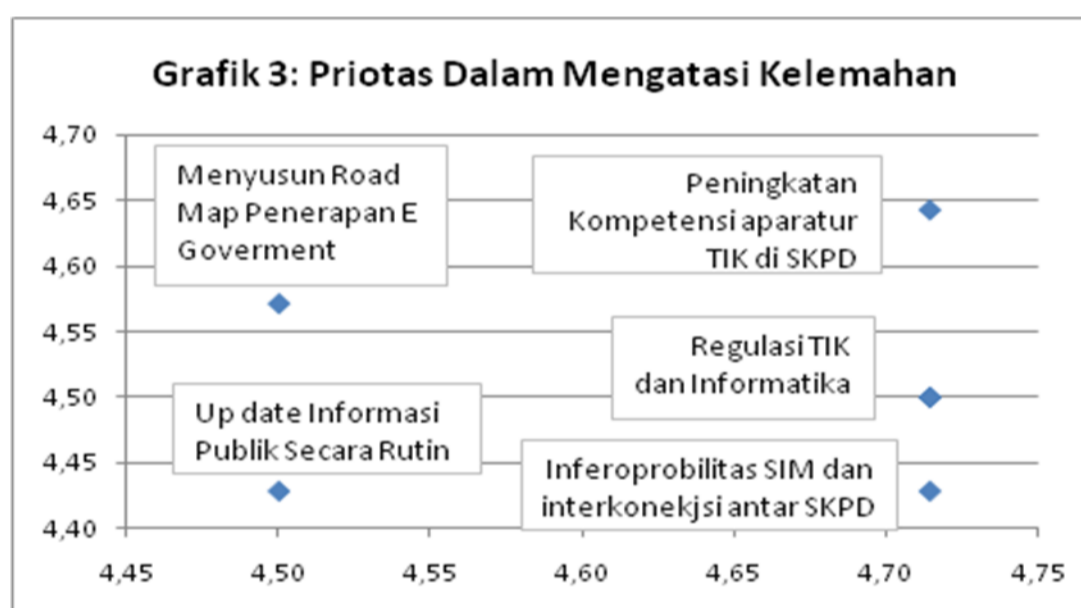


3. Strategi dasar untuk mengatasi kelemahan adalah merubah kondisi negatif menjadi positif. Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang komunikasi dan informatika.

³ Idid,

- b. Fasilitasi jaringan dan akses antar Organisasi Perangkat Daerah.
- c. Penyusunan dan penyediaan Daftar Informasi Publik sesuai Undang-undang KIP.
- d. Peningkatan pemahaman Aparatur Sipil Negara mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- e. Pengintegrasian data di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- f. Melakukan redistribusi beban tugas secara proporsinya di masing-masing bidang.
- g. Menyusun roadmap pengembangan komunikasi dan informatika untuk mendukung penerapan E-Government di Kabupaten Pematang

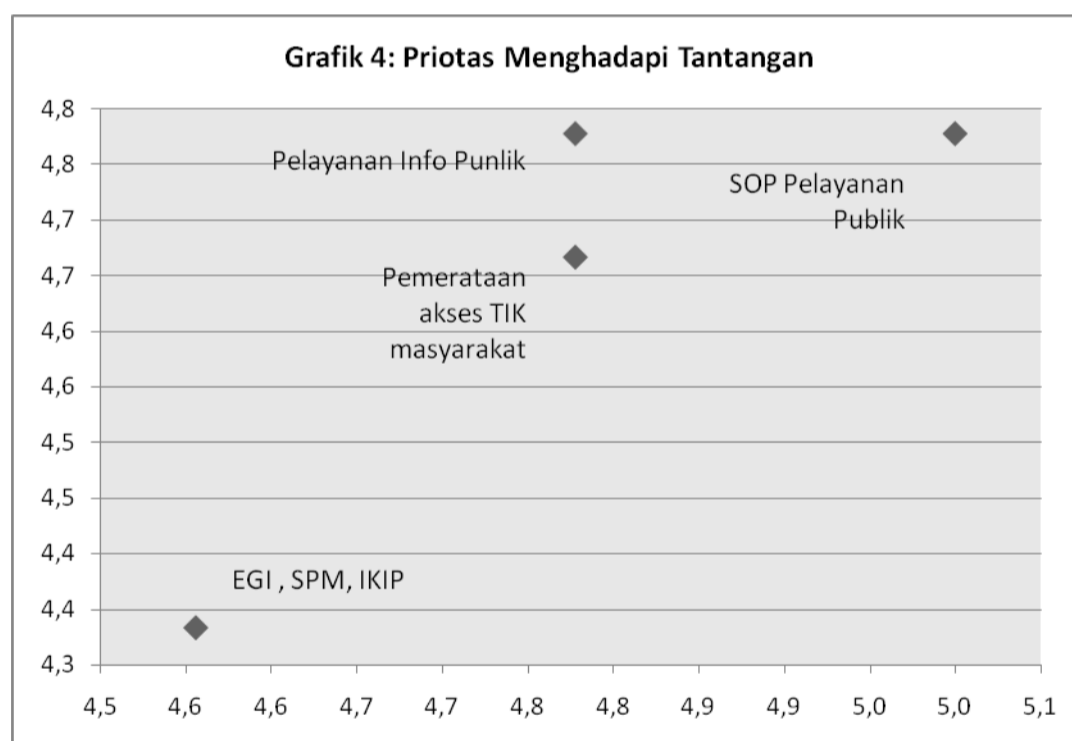
Grafik 3⁴ menggambarkan prioritas yang harus dilakukan untuk mengatasi kelemahan Diskominfo Kab Pematang. Peningkatan Kompetensi menduduki urutan pertama dengan tingkat kepentingan dan kemendesakan yang cukup tinggi, kemudian regulasi tentang TIK/Keterbukaan Informasi Publik, inferoperabilitas SIM dan interkoneksi antar SKPD, road map penerapan E Government dan up date informasi publik secara rutin.



⁴ Ibid,

4. Untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dengan cara memformulasi beberapa respon sebagai pijakan fundamental diantaranya dengan :
 - f. Menyusun SOP Pelayanan Informasi Publik untuk memastikan berjalannya pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau.
 - g. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dengan aktif menyediakan informasi publik yang telah diatur oleh UU KIP.
 - h. Menyusun kebijakan untuk menjadikan PEGI dan Peningkatan Indeks Keterbukaan Publik sebagai tolok ukur dalam menentukan keberhasilan E Government dan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pematang Jaya.
 - i. Pemerataan akses masyarakat terhadap informasi.
 - j. Menyusun SOP untuk terkait keamanan sistem TIK dan informasi.

Terkait dengan strategi mengatasi kelemahan dalam Pelayanan Publik, Pelayanan Informasi dan E Government, Grafik 4⁵ mengilustrasikan kebijakan yang secara cepat dan segera dirumuskan; yaitu SOP Pelayanan Publik, fasilitasi akses TIK kepada masyarakat, mengintensifkan komunikasi publik, dan menerapkan atau memenuhi standart PEGI, SPM dan PKIP.



⁵ Ibid,

Mengacu kepada tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Pematang, mempertimbangkan kekuatan, peluang, kelemahan, serta tantangan yang dihadapi, maka terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain :

1. **Menerapkan tata kelola E Government dan Pelayanan Informasi Publik.** E Government merupakan komitmen nasional, pelayanan informasi publik juga merupakan kewajiban sebagaimana di atur dalam UU Keterbukaan Informasi. Tata Kelola E Government dan Pelayanan Informasi Publik memerlukan regulasi dan SOP agar operasional dan menjadi acuan bagi setiap aparatur di SKPD/OPD. Kabupaten Pematang belum memiliki *Road Map* (Peta Jalan) tentang Penyelenggaraan *E-Government*, sehingga perlu disusun *Road Map E-Government*. Sedangkan terkait dengan Pelayanan Informasi Publik, regulasi yang sudah ada perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru (mutakhir).
2. **Mengintegrasikan data TIK dan data pelayanan publik.** Rintisan program E Government dan pelayanan publik, merupakan keniscayaan untuk diintegrasikan dalam pusat data. Data yang terintegrasi akan memudahkan bagi stake holder untuk mengakses data. Hal serupa juga dalam pelayanan informasi publik. Oleh karena itu, perlu interoperabilitas SIM di setiap SKPD/OPD, interkoneksi jaringan dan web site setiap SKPD, up dating data publik terkait proses perencanaan, anggaran, perkembangan di setiap tahapan serta monitoring hasil akhir kegiatan pembangunan. Apabila konsisten dilaksanakan, dengan sendirinya akan meningkatkan Pelayanan Publik.
3. **Membangun infrastruktur jaringan TIK dan komunikasi publik.** Untuk menopang penerapan E Government dan komunikasi publik, diperlukan infrastruktur yang memadai. Baik itu infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi maupun infrastruktur komunikasi publik
4. **Peningkatan kompetensi tenaga TIK dan komunikasi publik.** Untuk mendukung E Government, penerapan TIK serta pelayanan informasi publik, pada setiap SKPD/OPD diperlukan tenaga khusus yang memiliki kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan komunikasi publik. Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil negara diperlukan mengingat

ketersediaan aparatur yang memiliki kompetensi sebagaimana tersebut di atas masih minim.

5. **Pemberdayaan Masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Kesadaran dan kemampuan masyarakat terhadap TIK merupakan keniscayaan untuk mendukung E Government dan Keterbukaan Informasi Publik. Di setiap kelompok masyarakat perlu dikembangkan simpul-simpul untuk mengedukasi komunitasnya masing-masing dalam TIK. Dengan demikian, jaringan infrastruktur TIK yang ada bisa dioptimalisi untuk kegiatan-kegiatan yang edukative dan produktive.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Posisi dan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dengan demikian, pada satu sisi menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada saat yang sama juga berada pada garda terdepan dalam bidang komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan masyarakat Pemalang dan pihak –pihak yang berkepentingan.

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas yang mendukung pembangunan Jangka Menengah Daerah yang tercantum pada **misi yang ke 1 (satu)** yaitu Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah, mufakat, dan gotong royong dan **misi yang ke 6 (Enam)** yaitu *Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.*

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjati diri, Mandiri dan Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI 1 : Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong			
1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencanaan mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah	Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta penyusunan berbagai laporan kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan
MISI 6 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah			

VISI : Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjati diri, Mandiri dan Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	1. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;	a. Pengembangan kapasitas, kualitas, dan etos kerja aparatur; b. Pengembangan dan penerapan regulasi secara konsisten dan menyeluruh	Peningkatan penerapan reformasi birokrasi secara baik menuju pemerintahan yang baik dan bersih
	2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Penerapan SPP, maklumat pelayanan, dan pengukuran kepuasan masyarakat diprioritaskan pada SKPD yang melakukan pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik terutama pada PD yang melakukan pelayanan publik
	3. Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informasi guna menunjang pelayanan public	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	

Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai penentuan langkah-langkah yang lebih operasional. Tujuan dan Sasaran merupakan kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dari visi dan misi Kepala Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran SKPD untuk mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Adapun Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
 Tujuan dan sasaran Program Prioritas daerah Urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan Persandian

Tujuan	Sasaran	Indikasi sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas jaringan telekomunikasi dan Informatika guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	Titik Hot spot	Na	3	6	9	12	14	14

Tabel 4.3

Tujuan, sasaran dan Indikator Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2016 - 2021

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	TARGET KINERJA					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	- Nilai LKJIP	C	C	C	C	B	B
Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.	- Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar	20	40	60	80	100	100
		- Peningkatan E-Government Indonesia	20	18	15	10	8	5
		- Prosentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.	- Prosentase layanan pengaduan						

pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik		masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	20	40	60	80	100	100
		- Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	33	16	14	14	12	10
		- Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website pemalangkab.go.id dan website perangkat daerah	50	70	80	100	100	100
	Memperkuat kualitas Aparat Komunikasi Informatika.	- Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	20	40	60	80	100	100
	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik	- Rasio berita positif dan negatif di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang	50:50	60:40	70:30	80:20	90:10	95:5
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	- Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasi media	12	12	13	14	14	14
	Terintegrasinya data SKPD/OPD	- Prosentase ketersediaan data Statistik terintegrasi	Na	40	60	80	100	100

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)						
Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan public	Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.	- Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar	20	40	60	80	100	100
		- Pemeringkatan E-Government Indonesia	20	18	15	10	8	5
		- Prosentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.	- Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	20	40	60	80	100	100
		- Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	33	16	14	14	12	10
		- Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website pemalangkab.go.id dan website perangkat daerah	50	70	80	100	100	100

	Memperkuat kualitas Aparatur Komunikasi Informatika.	- Prosentase Aparatur Sipil yang tampil di bidang komunikasi dan informatika	20	40	60	80	100	100
	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik	- Rasio berita positif dan negatif di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang	50:50	60:40	70:30	80:20	90:10	95:5
	Terintegrasinya data SKPD/OPD	- Prosentase ketersediaan data Statistik terintegrasi	Na	40	60	80	100	100

Berdasarkan perubahan regulasi dalam penyelenggaraan E-Government yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikeluarkan tanggal 5 Januari 2018 dan reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi (PP dan RB) pada bulan Mei 2018, dan Reviu Indikator Kinerja Utama pada bulan Oktober 2018, maka ada perubahan indikator Sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

Tabel 4.5

Tabel 4.5

Tujuan, sasaran dan Indikator Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)						
Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	- Nilai LKJIP	C	C	C	C	B	B
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.	- Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	20	40	60	80	100	100
		- Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	33	16	14	14	12	10

		- Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website pemalangkab.go.id dan website perangkat daerah	50	70	80	100	100	100
	Memperkuat kualitas Aparat Komunikasi Informatika.	- Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	20	40	60	80	100	100
	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik	- Rasio berita positif dan negatif di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang	50:50	60:40	70:30	80:20	90:10	95:5
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	- Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasi media	12	12	13	14	14	14
Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.	- Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar	20	40	60	80	100	100
		- Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Na	Na	3	3	3	3
		- Pemenuhan Standar Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI)	Na	20	40	60	70	80

	Terintegrasinya data SKPD/OPD	- Prosentase ketersediaan data Statistik terintegrasi	Na	40	60	80	100	100
--	-------------------------------	-------------------------------------------------------	----	----	----	----	-----	-----

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2016 - 2021

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	TARGET KINERJA					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.	- Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	20	40	60	80	100	100
		- Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	33	16	14	14	12	10
		- Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada	50	70	80	100	100	100

		Website pemalangkab.go.id dan website perangkat daerah							
	Memperkuat kualitas Aparat Komunikasi Informatika.	- Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	20	40	60	80	100	100	
Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.	- Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar	20	40	60	80	100	100	
		- Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Na	Na	3	3	3	3	
		- Pemenuhan Standar Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI)	Na	20	40	60	70	80	
	Terintegrasinya data SKPD/OPD	- Prosentase ketersediaan data Statistik terintegrasi	Na	40	60	80	100	100	

4.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Kabupaten Pemalang yang menjadi tugas dan fungsi Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 5 (lima) tahun kedepan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Berdasarkan analisis dari pembobotan dengan menggunakan metode profesional judgement, maka terdapat 5 (lima) strategi pilihan yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah.
2. Menerapkan tata kelola E Government dan Pelayanan Informasi Publik.
3. Mengintegrasikan data TIK dan data pelayanan publik.
4. Membangun infrastruktur jaringan TIK dan komunikasi publik.
5. Pemberdayaan Masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mendasarkan pada tujuan RPJMD adalah sebagai berikut:

Tujuan 1:

Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah

Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

Strategi:

Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah.

Kebijakan:

- Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta penyusunan berbagai laporan kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan

Tujuan 2 :

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik

Sasaran 1: Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.

Strategi:

- Pemanfaatan TIK dalam kegiatan pelayanan publik secara transparan, cepat dan handal.

Kebijakan:

- Restrukturasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di setiap OPD.
- Meningkatkan peran PPID dalam menghimpun dan mengelola data
- Menyusun SOP Standar Layanan Informasi Publik.
- Membekali sarana dan prasarana teknologi informasi bagi PPID untuk kebutuhan layanan informasi publik

- Menyediakan sarana informasi publik.
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan informasi publik.
- Menyediakan konten layanan informasi publik.
- Membuka layanan partisipasi, aspirasi, dan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Pengembangan layanan informasi.

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas Aparatur di bidang Komunikasi Informatika

Strategi:

Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan:

- Meningkatkan keahlian dan keterampilan Aparatur Sipil Negara di setiap SKPD/OPD di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan prima

Sasaran 3: Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik

Strategi : Optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan media informasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kebijakan:

- Meningkatkan peran PPID sebagai juru bicara lembaga
- Meningkatkan kerjasama informasi dengan media massa
- Meningkatkan kualitas media milik pemerintah daerah
- Penguatan literasi media untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya

Sasaran 4 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi

Strategi:

Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi untuk diseminasi program pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik.

Kebijakan:

- Penguatan literasi media untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya

- Pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tujuan 2 :

Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik

Sasaran : Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Strategi: Mengembangkan sarana dan prasarana TIK untuk mewujudkan data terpadu.

Kebijakan:

- Membangun data center dan NOC.
- Pengembangan jaringan FO
- Menyusun standarisasi perangkat lunak dan perangkat keras
- Menyusun standar basis data
- Menyusun mekanisme interoperabilitas antar data.
- Menyediakan server basis data dan aplikasi
- Menyediakan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile
- Melakukan tuning (optimalisasi) aplikasi dan basis data untuk mempercepat aksesibilitas.

Sasaran 6: Terintegrasinya data antar SKPD/OPD

Strategi: Mengoptimalkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kebijakan:

- Pemanfaatan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dan penguatan statistic sectoral
- Menyediakan data yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat

Kemudian di buat tabel keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Tabel 4.7**Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah.	Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta penyusunan berbagai laporan kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan

2.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra public	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik	- Pemanfatan TIK dalam kegiatan pelayanan publik secara transparan, cepat dan handal.	<ul style="list-style-type: none"> - Restrukturasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di setiap OPD. - Meningkatkan peran PPID dalam menghimpun dan mengelola data - Menyusun SOP Standar Layanan Informasi Publik. - Menyediakan sarana informasi publik. - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan informasi publik. - Menyediakan konten layanan informasi publik. - Membuka layanan partisipasi, aspirasi, dan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan - Pengembangan layanan informasi.
		Meningkatnya kualitas Aparatur di bidang Komunikasi Informatika	Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keahlian dan keterampilan Aparatur Sipil Negara di setiap SKPD/OPD di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan prima

		Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pematang di Mata Publik	Optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan media informasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kerjasama informasi dengan media massa - Meningkatkan kualitas media milik pemerintah daerah - Penguatan literasi media untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi	Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi untuk diseminasi program pembangunan, penyediaan database profil wilayah dan meningkatkan pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan literasi media untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya - Pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

2.	Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengembangkan sarana dan prasarana TIK untuk mewujudkan data terpadu	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun data center dan NOC berstandar. - Pengembangan jaringan FO - Fasilitasi pemerintah kepada masyarakat untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi - Menyusun standarisasi perangkat lunak dan perangkat keras - Menyusun standar basis data- - Menyusun mekanisme interoperabilitas antar data. - Menyediakan server basis data dan aplikasi - Menyediakan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile - Melakukan tuning (optimalisasi) aplikasi dan basis data untuk mempercepat aksesibilitas - Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik. - Menyediakan dan memelihara data center
		Terintegrasinya data antar SKPD/OPD	Mengoptimalkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dan penguatan statistic sektoral - Menyediakan data yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, DAN KERANGKA PENDANAAN

V.1. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informasi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
- d. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- g. Perbaikan peralatan kerja
- h. Penyediaan alat tulis kantor
- i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
- k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- l. Penyediaan bahan logistik kantor
- m. Penyediaan peralatan rumah tangga
- n. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- o. Penyediaan makanan dan minuman
- p. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- q. Penyediaan jasa keamanan

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan:

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
- c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- d. Pengadaan komputer dan perlengkapannya
- e. Pengadaan alat-alat elektronik
- f. Pengadaan mebeleur
- g. Pengadaan peralatan gedung kantor
- h. Pengadaan lemari besi dan feeling kabinet
- i. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- j. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
- k. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- l. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- m. Rehab sedang/berat gedung kantor
- n. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya
- o. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik
- p. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor LPPL Swara Widuri
- q. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor LPPL Swara Widuri
- r. Pemeliharaan peralatan studio LPPL Swara Widuri

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan:

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

kegiatan:

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- c. Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi

5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan:

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- c. Penyusunan pelaporan prognosis
- d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- e. Monitoring, Evaluasi

6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

- a. Penyusunan data base perencanaan SKPD
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi;
- c. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi;
- d. Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
- e. Pengkajian dan Pengembangan sistem Komunikasi dan Informasi;
- f. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi;
- g. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- h. Fasilitasi Pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
- k. Penyelenggaraan ekosistem smart city
- l. Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagai pakai
- m. Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah

- n. Pengelolaan infrastruktur e-government, data dan informasi terintegrasi

8. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan

Informasi

kegiatan :

- a. Asistensi/bimbingan Teknis bidang manajemen komunikasi publik
- b. Asistensi/bimbingan Teknis bidang Teknis Jurnalistik
- c. Asistensi/bimbingan Teknis bidang analisis data
- d. Asistensi/bimbingan teknis bidang komunikasi organisasi
- e. Sosialisasi Kehumasan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Pematang

9. Program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media

kegiatan :

- a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;
- b. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat.

10. Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah

kegiatan :

- a. Koordinasi bidang komunikasi dan informasi lintas SKPD, lintas instansi vertikal, BUMDA, dan swasta
- b. Revitalisasi pendayagunaan media center daerah
- c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur komunikasi dan informasi daerah
- d. Penyusunan Manual Prosedur penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat

- e. Penguatan Komunikasi Publik melalui website dan media center
- f. Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik
- g. Penyelenggaraan Government CIO
- h. Pemberdayaan dan Pemanfaatan E-Government

11. Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika,

kegiatan :

- a. Pelayanan Informasi melalui Media Online;
- b. Pengelolaan dan Inventarisasi Data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah.
- c. Penyusunan Standar dokumentasi dan publikasi isu-isu strategis
- d. Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informatika dan komunikasi
- e. Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baleho dll
- f. Monitoring informasi, peristiwa dan pemberitaan daerah
- g. Dokumentasi/publikasi program/kegiatan SKPD
- h. Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (advertorial)
- i. Komunikasi Publik melalui dialog interaktif, radio dan televisi
- j. Pelayanan informasi melalui media on line
- k. Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah
- l. Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat

12. Program Pengembangan Data/Statistik daerah

Kegiatan:

- a. Penyusunan dan pengumpulan data Statistik Daerah
- b. Pengelolaan data statistik daerah

13. Program Pengembangan Persandian/informasi daerah

Kegiatan:

- a. Pengamanan komunikasi dan informasi
- b. Penyelenggaraan keamanan informasi

Tabel 5.1
Penetapan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penganggung Jawab
						2016		2017		2018		2019		2020		2021 (prediksi N+1)		Target	Rp (jutaan)	
						Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LKJIP			Na	Na		C		C		C		B		B		B		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	0	0	0	610		1006		1175		1316		1345		6087		Diskominfo
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat dengan baik	0	0	0	3500 surat, 12 bulan	30	3500 surat, 12 bulan	50	3500 surat, 12 bulan	50	3500 surat, 12 bulan	50	3500 surat, 12 bulan	50	17.500 surat, 60 bulan	230	Diskominfo

			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sumber daya komunikasi, air, dan listrik	0	0	0	3 jenis 12 bln	160	3 jenis 12 bln	200	3 jenis 12 bln	250	3 jenis 12 bln	300	3 jenis 12 bln	300	15 jenis, 60 bulan	1210	Disk omi nfo
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0	0	0	1 paket, 12 bulan.	20	1 paket, 12 bulan.	25	1 paket, 12 bulan.	30	1 paket, 12 bulan.	30	5 paket, t,	105	Disk omi nfo
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/ operasional	0	0	0	5 kendaraan, 12 bulan	5	20 kendaraan, 12 bulan.	20	9 kendaraan, 12 bulan	35	18 kendaraan.	50	20 kendaraan.	50	20 kendaraan .	160	Disk omi nfo
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	0	0	0	144 dok SPP/SPM,	100	150	130	170	150	180	150	190	150	190	1370	Disk omi nfo
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kebersihan kantor	0	0	0	1 tahun	30	1 tahun	40	1 tahun	50	1 tahun	60	1 tahun	60	5 tahun	240	Disk omi nfo
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja	0	0	0	jenis.		1 tahun.	25	1 tahun .	30	1 tahun	30	1 tahun	30	5 tahun .	115	Disk omi nfo
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	0	0	0	1 paket, 1 th.	15	1 paket, 1 th.	20	1 paket, 1 th	20	1 paket, 1 th	25	1 paket, 1 th	30	5 paket, 5 th.	110	Disk omi nfo

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kbuth barang cetakan dan penggandaan	0	0	0	6 paket 1 tahun	15	6 paket	30	6 paket	35	6 paket	40	6 paket 1 tahun	40	35 paket	160	Disk omi nfo
			Penyediaan Komponen/Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen/instalasi listrik	0	0	0	6 jenis	40	6 jenis	78	6 jenis	95	7 jenis	100	7 jenis	100	36 jenis	413	Disk omi nfo
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0	0	0	1 tahun	43	1 tahun	45	1 tahun	48	1 tahun	50	1 tahun	186	Disk omi nfo
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	0	0	0	0	0	1 tahun	43	1 tahun	45	1 tahun	48	1 tahun	50	5 tahun	186	Disk omi nfo
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedianya bahan bacaan	0	0	0	2 jenis, 12 bulan	10	2 jenis, 12 bulan	47	2 jenis, 12 bulan	50	2 jenis, 12 bulan	60	2 jenis, 12 bulan	60	10 jenis, 60 bulan	227	Disk omi nfo
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	0	0	0	0	0	1 tahun	32	1 tahun	35	1 tahun	40	1 tahun	45	5 tahun	152	Disk omi nfo
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	0	0	0	10 jenis, 12 bulan	30	12 bulan	48	12 bulan	50	12 bulan	60	12 bulan	60	60 bulan	248	Disk omi nfo

			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	0	0	0	, 1 tahun	150	1 tahun	150	1 tahun	170	1 tahun	180	1 tahun	190	5 tahun	840	Diskominfo
			Penyediaan Jasa Keamanan	Terpenuhinya kebutuhan jasa keamanan	0	0	0	12 bulan,	25	12 bulan.	30	12 bulan.	40	12 bulan.	45	12 bulan.	50	60 bulan	135	Diskominfo
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	Diskominfo
				Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik setiap bulan																
			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Pengadaan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	0	0		1 unit roda 4	234	8 unit roda 2, 1 unit roda 4	650	4 unit roda 2,	80	2 unit roda 4	450	4 unit roda 2	80	16 roda 2, 4 unit roda 4	1494	Diskominfo
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	0	0	0	0	0	1 jenis, 1 keg	38	1 jenis, 1 keg	40	1 jenis, 1 keg	40	1 jenis, 1 keg	50	3 jenis (3 keg)	168	Diskominfo
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	0	0	0	0	0	1 paket	67	1 pake	75	1 paket	80	1 paket	85	3 paket	307	Diskominfo

			Pengadaan Mebeler	Tersedianya mebeler kantor	0	0	0	1 paket	50	1 paket	49,5	1 paket	52	1 paket	50	1 paket	47,5	4 paket	152	Disk omi nfo
			Pengadaan Komputer dan perlengkapannya	Tersedianya komputer dan perlengkapannya	0	0	0	2 jenis (3 laptop, 2 printer)	35	2 jenis (4 laptop, 1 printer)	47	2 jenis (komputer PC 2, Scanner)	40	2 Jenis (laptop 2, 2 mesin ketik)	40	1 jenis (laptop)	15	4 jenis (laptop, mesin ketik, printer, scanner)	177	Disk omi nfo
			Pengadaan alat-alat elektronik	Tersedianya peralatan elektronik	0	0	0	3 jenis, TV, AC, KULKas	50	5 jenis (brankas, mesin hitung, mesin penghancur kertas, fotokopi, TV)	83	2 jenis (TV, sound system)	100	2 jenis (AC, kulkas)	60	2 jenis, TV, mesin hitung	30	8 jenis (AC, kulkas, TV, sound system, brankas, mesin hitung, mesin penghancur kertas, fotokopi)	323	Disk omi nfo
			Pengadaan Lemari besi dan filing cabinet	Tersedianya lemari besi dan filing kabinet	0	0	0	2 jenis (3 lemari 3 filing cabinet)	56	2 jenis (2 lemari, 2 filing cabinet)	45	2 jenis (lemari, foiling kabinet)	25	2 jenis (lemari, filing kabinet)	30	2 jenis (lemari, filing kabinet)	40	2 jenis (lemari, filing kabinet)	196	Disk omi nfo

			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	0	0	0	3 gedung	40	2 gedung	122	2 gedung	130	2 gedung	140	2 gedung	140	3 gedung	572	Disk omi nfo
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	0	0	0	3 kendaraan roda 4	30	5 kendaraan roda , 2 kendaraan roda 2	90	6 roda 4 10 roda 2	120	7 roda 4 10 roda 2	140	7 roda 4 10 roda 2	150	7 roda 4 10 roda 2	530	Disk omi nfo
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0	0	0	0	0	1 tahun	50	1 tahun	60	1 tahun	60	,1 tahun	60	4 tahun	230	Disk omi nfo
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	0	0	0	1 tahun	20	1 tahun	50	1 tahun	60	1 tahun	60	1 tahun	60	4 tahun	250	Disk omi nfo
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeler	Terlaksananya pemeliharaan mebeler	0	0	0	0	0	1 paket	10	1 paket	15	1 paket	15	1 paket	15	4 paket	55	Disk omi nfo
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer dan perlengkapan	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan perlengkapannya	0	0	0	1 paket	15	1 paket	47	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	50	4 paket	212	Disk omi nfo
			Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat elektronik	0	0	0	0	0	1 tahun	34	1 tahun	40	1 tahun	40	1 tahun	40	4 tahun	154	Disk omi nfo
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	0	0	0	0	0	1 tahun	35	1 tahun	40	1 tahun	40	1 tahun	43	4 tahun	158	Disk omi nfo

			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor LPPL Swara Widuri	Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung LPPL Swara Widuri	0	0	0	0	0	1 tahun	80	1 tahun	85	1 tahun	85	1 tahun	85	4 tahun	335	Diskominfo
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor LPPL Swara Widuri	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung LPPL Swara Widuri	0	0	0	0	0	1 tahun	50	1 tahun	50	1 tahun	50	1 tahun	50	4 tahun	200	Diskominfo
			Pemeliharaan rutin peralatan studio LPPL Swara Widuri	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan studio LPPL Swara Widuri	0	0	0	0	0	1 tahun	50	1 tahun	50	1 tahun	50	1 tahun	50	4 tahun	200	Diskominfo
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		0	0	0	0	0	1 tahun	46	1 tahun	50	1 tahun	50	1 tahun	50	4 tahun	196	Diskominfo
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0	0	0	0	50 stel	46	1 tahun	50	1 tahun	50	1 tahun	50	4 tahun	196	Diskominfo
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0	0	0	6 kegiatan , 180 orang	120	8 kegiatan , 200 orang	406	9 kegiatan, 250 orang	400	9 kegiatan, 300 orang	550	9 kegiatan, 300 orang	570	41 kegiatan, 1230 orang	2046	Diskominfo
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	0		6 kegiatan	50	6 kegiatan	100	6 kegiatan	120	6 kegiatan	130	6 kegiatan	140	30 kegiatan	540	Diskominfo

			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	2 kegiatan	206	3 kegiatan	160	3 kegiatan	270	3 kegiatan	280	11 kegiatan	916	Diskominfo
			Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	Terlaksananya pelatihan tupoksi dan pengiriman peserta diklat/workshop/seminar	0	0	0	180 orang	70	200 orang	100	250 orang	120	300 orang	150	300 orang	150	1230 orang	590	Diskominfo
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja	0	0	0	3 laporan	10	3 laporan, 12 bulan	225	3 laporan 12 bulan	245	3 laporan, 12 bulan	250	3 laporan 12 bulan	250	15 laporan, 60 bulan	980	Diskominfo
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja	0	0	0	1 Laporan	5	1 Laporan	15	1 Laporan	15	1 Laporan	15	1 Laporan	15	5 Laporan	65	Diskominfo
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	0	0	0	1 Laporan	5	1 Laporan	15	1 Laporan	15	1 Laporan	15	1 Laporan	15	5 Laporan	65	Diskominfo
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	0	0	0	1 laporan	5	1 laporan	95	1 laporan	95	1 laporan	100	1 laporan	100	5 laporan	390	Diskominfo
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monev	0	0	0	0	0	12 bulan	100	12 bulan	120	12 bulan	120	12 bulan	120	48 bulan	460	Diskominfo

			Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD		0	0	0		90	11 dokumen	271	11 dokumen	275	11 dokumen	280	11 dokumen	290	44 dokumen	1146	Diskominfo
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen renja, rka,dpa, rkap,dppa	0	0	0	0	0	7 dok(renja, rka,dpa, rkap,dppa	131	7 dok (renja, rka,dpa, rkap,dppa	135	7 dok renja, rka,dpa, rkap,dppa	140	7 dok renja, rka,dpa, rkap,dppa	140	35 dok renja, rka,dpa, rkap,dppa	636	Diskominfo
			Penyusunan data base perencanaan SKPD	Tersusunnya dokumen Renstra, Renja,	0	0	0	7 dokumen (Renja dan perub Renja,RKA/ DPA,RKAP/ DPPA dan Renstra)	50	4 dokumen (Renja dan perub Renja, dan Renstra)	70	4 dokumen (Renja dan perub Renja, dan Renstra)	100	4 dokumen (Renja dan perub Renja, dan Renstra)	140	4 dokumen (Renja dan perub Renja, dan Renstra)	150	23 dokumen (Renja dan perub Renja ,RKA/ DPA, RKAP /DPP A dan Renstra)	510	Diskominfo

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra public	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat di Kabupaten Pemalang		0	184	14	2439	14	7899	14	1686	14	1580	14	1580	14	13232	Diskominfo
			Penguatan komunikasi publik melalui website dan SMS Center	Fasilitasi media center dan penguatan komunikasi publik dalam rangka pelayanan aduan masyarakat melalui website dan SMS center	0	0	0	12 bulan layanan aduan masyarakat melalui website dan SMS center, 1 paket jasa	250	12 bulan layanan aduan masyarakat melalui website dan SMS center, 1 paket jasa	305	12 bulan layanan aduan masyarakat melalui website dan SMS center, 1 paket jasa	300	12 bulan layanan aduan masyarakat melalui website dan SMS center, 1 paket jasa	300	12 bulan layanan aduan masyarakat melalui website dan SMS center, 1 paket jasa	300	60 bulan layanan aduan masyarakat melalui website dan SMS center, 5 paket jasa	1455	Diskominfo

		Tingkat Pemenuhan Informasi Publik melalui website pemalangkab.go.id	Revitalisasi pendayagunaan media center daerah	terpeliharanya pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui media center daerah	300 upload berita, 500 upload foto dok	300 upload berita, 500 upload foto dok	129	300 upload berita, 500 upload foto dok	200	300 upload berita, 500 upload foto dok	250	300 upload berita, 500 upload foto dok	250	300 upload berita, 500 upload foto dok	250	1500 upload berita, 2500 upload foto	1329	Diskominfo
		Pemeriksaan Keterbukaan Informasi Publik	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Komunikasi dan Informasi	Perentase SKPD yang telah memiliki website	Na		2091	0	0		4036		3820	3820	3820		21875	Diskominfo
			Pengelolaan dan Inventarisasi Data Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	penyusunan DIP, rakor PPID dan PPID Pembantu, sengketa informasi	2 perbup DIP, 4 rakor PPID, 4 fasilitas sengketa informasi	2 perbup DIP, 4 rakor PPID, 4 fasilitas sengketa informasi	135	2 perbup DIP, 4 rakor PPID, 4 fasilitas sengketa informasi	150	2 perbup DIP, 4 rakor PPID, 4 fasilitas sengketa informasi	280	2 perbup DIP, 4 rakor PPID, 4 fasilitas sengketa informasi	200	2 perbup DIP, 4 rakor PPID, 4 fasilitas sengketa informasi	200	2 perbup DIP, 4 rakor PPID, 4 fasilitas sengketa informasi	1165	Diskominfo
			Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informatika dan komunikasi	Jumlah informasi strategis dan aktual nasional melalui media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar	0	0	0	0	0	30 kegiatan desinimasi aktual nasional melalui media massa, media baru media tradisional 360 hari	400	30 kegiatan desinimasi aktual nasional melalui media massa, media baru	400	30 kegiatan desinimasi aktual nasional melalui media massa, media baru	400	120 desinimasi, 360 desinimasi media	1600	Diskominfo

				ruang yang diproduksi dan didesiminasikan						desiminasi melalui media baru dan 12 kegiatan media luar ruang		media tradisional 360 hari desiminasi melalui media baru dan 12 kegiatan media luar ruang		media tradisional 360 hari desiminasi melalui media baru dan 12 kegiatan media luar ruang		baru media tradisional 360 hari desiminasi melalui media baru dan 12 kegiatan media luar ruang		baru, 44 ke me4 dia luar ruang		
			Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, balego dll	jumlah pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet dan baliho	0	0	0	10000 poster, 10000 leaflet	350	10000 poster, 10000 leaflet	350	10000 poster, 10000 leaflet	350	10000 poster, 10000 leaflet	350	10000 poster, 10000 leaflet	350	5000 poster, 5000 leaflet	1600	diskominfo
			Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan SKPD	terdokumentasinya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah	380 dok, 200 buku himpunan sambutan bupati, 200 buku kliping berita harian, 4 video	380 dok, 200 buku himpunan sambutan bupati, 200 buku kliping berita harian, 4 video	477	380 dok, 200 buku himpunan sambutan bupati, 200 buku kliping berita harian, 4 video	400	380 dok, 200 buku himpunan sambutan bupati, 200 buku kliping berita harian, 4 video	450	380 dok, 200 buku himpunan sambutan bupati, 200 buku kliping berita harian, 4 video	450	380 dok, 200 buku himpunan sambutan bupati, 200 buku kliping berita harian, 4 video	450	380 dok, 200 buku himpunan sambutan bupati, 200 buku kliping berita harian, 4 video	450	820 dok, 800 buku himpunan sambutan bupati, 800 buku kliping, 16 video	2677	Diskominfo

	Memperkuat kualitas Aparat Komunikasi Informatika	Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi		0	0	150	0	120		439		690		710		725		2834	Diskominfo
			Pengembangan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Terpenuhinya peningkatan SDM bidang Kominfo	0	0	0	0	0	0	0	180 orang	150	180 Orang	150	180 Orang	150	540 Orang	450	Diskominfo
			Asisten/bimbingan teknis bidang manajemen komunikasi publik	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	0	0	0	0	0	1 kegiatan	59	1 kegiatan	60	1 kegiatan	60	1 kegiatan	65	4 kegiatan	244	Diskominfo
			Asistensi/bimbingan teknik jurnalistik	Fasilitasi peningkatan aparatur pemerintah daerah dalam bidang jurnalistik	0	0	0	0	0	1 kegiatan	58	1 kegiatan	60	1 kegiatan	60	1 kegiatan	60	4 kegiatan	238	Diskominfo
			Asisten/bimbingan teknis bidang analisis data	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	0	0	0	0	0	1 kegiatan	92	1 kegiatan	90	1 kegiatan	90	1 kegiatan	90	4 kegiatan	362	Diskominfo

			Asisten/bimbingan teknis bidang komunikasi organisasi	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	0	0	0	0	0	1 kegiatan	90	1 kegiatan	90	1 kegiatan	90	1 kegiatan	90	4 kegiatan	360	Diskominfo
			Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten pemalang	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi kehumasan	2 kegiatan	2 kegiatan	150	2 kegiatan	120	2 kegiatan	140	2 kegiatan	140	2 kegiatan	140	2 kegiatan	140	8 kegiatan	830	Diskominfo
			Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Terpenuhinya peningkatan SDM bidang Kominfo	0	0	0	0	0	0	0	2 kegiatan	100	2 kegiatan	120	2 kegiatan	130	6 kegiatan	350	Diskominfo
	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik	Rasio berita positif dan negatif di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang	Program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media			4 paket 3 edisi majalah, 3 edisi tabloid, 6 kali pemutaran film	850	5 paket, 3 edisi majalah, 3 edisi tabloid, 12 edisi koran, 12 kali pemutaran film	1100	5 paket, 3 edisi majalah, 3 edisi tabloid, 12 edisi koran, 12 kali pemutaran film	1252	6 paket, 3 edisi majalah, 3 edisi tabloid, 12 edisi koran, 12 kali pemutaran film	1320	6 paket, 3 edisi majalah, 3 edisi tabloid, 12 edisi koran, 12 kali pemutaran film	1320	6 paket, 3 edisi majalah, 3 edisi tabloid, 12 edisi koran, 12 kali pemutaran film	1320	23 paket, 12 edisi majalah, 12 edisi tabloid, 44 edisi koran, 12 kali pemutaran film	7162	Diskominfo

																			film		
			Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media	4 paket	4 paket	641	4 paket	650	4 paket	750	5 paket	800	5 paket	800	5 paket	800	19 paket	4441	Disk omi nfo	
			Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah tersebarnya informasi pemerintahan daerah melalui penerbitan majalah, tabloid, koran dan terlaksananya pelayanan multimedia	3 edisi majalah, 3 edisi tabloid	3 edisi majalah, 3 edisi tabloid	186	1 paket 1 tahun, 3 edisi majalah, 3 edisi tabloid, 12 edisi koran,	400	1 paket 1 tahun, 3 edisi majalah, 3 edisi tabloid, 12 edisi koran,	432	1 paket 1 tahun, 3 edisi majalah, 3 edisi tabloid, 12 edisi koran,	450	1 paket 1 tahun, 3 edisi majalah, 3 edisi tabloid, 12 edisi koran,	450	1 paket 1 tahun, 3 edisi majalah, 3 edisi tabloid, 12 edisi koran,	450	4 paket , 12 edisi majalah, 12 edisi tabloid, 44 edisi koran	2368	Disk omi nfo	

			Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Terlaksananya desiminasi informasi	6 kali	6 kali	23	6 kali	50	12 kali	70	12 kali	70	12 kali	70	12 kali	70	44 kali	353	Diskominfo
			Program Peningkatan Ketatalaksanaan Komunikasi dan Informasi	Perentase SKPD yang telah memiliki website	0	0	2091	0	0		4036		3820		3820		3820		21875	Diskominfo
			Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, balego dll	jumlah pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet dan baliho	0	0	0	10000 poster, 10000 leaflet	350	10000 poster, 10000 leaflet	350	10000 poster, 10000 leaflet	350	10000 poster, 10000 leaflet	350	10000 poster, 10000 leaflet	350	5000 poster, 5000 leaflet	1600	diskominfo
			Monitoring informasi peristiwa dan pemberitaan aktual lintas daerah	dokumen analisis isu pemberitaan daerah	0	0	0	0	0	2 dokumen	120	2 dokumen	120	2 dokumen	120	2 dokumen	120	8 dokumen	480	Diskominfo

	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasi media	Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Pematang		0	184	14	2439	14	7899	14	1686	14	1580	14	1580	14	13232	Diskominfo
			Koordinasi bidang komunikasi dan informasi lintas SKPD, lintas instansi vertikal, BUMDA dan swasta lokal	Pembentukan dan Rakor Bakohumas	0	0	0	0	0	6 kegiatan	250	6 kegiatan	250	6 kegiatan	250	6 kegiatan	250	24 kegiatan	1000	Diskominfo
			Penyusunan standar operasional prosedur komunikasi dan informasi daerah	terbentuknya SOP komunikasi dan informasi	0	0	0	0	0	3 dok	106	3 dok	106	0	0	0	0	6 dok	212	Diskominfo

			Penyusunan manual prosedur penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat	Terbentuknya SOP penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat	0	0	0	0	0	3 dok	105	0	0	0	0	0	0	3 dok	105	Diskominfo
			Penguatan kelembagaan informasi publik	terlaksananya fasilitas KIM dan forum TI	3 kegiatan	3 kegiatan	55	3 kegiatan	60	3 keg	80	4 ke	100	4 keg	100	4 keg	100	21 keg	495	Diskominfo
			Penyelenggaraan Government CIO	tersedianya kebijakan regulasi dan tata kelola sistem transaksi elektronik	0	0	0	Rakor Government CIO	684	1 roadmap e-governmen t dan 1 regulasi	750	4 Rakor Government CIO	300	4 rakor government CIO	300	4 rakor government CIO	300	16 rakor Government CIO, 1 roaqa map, 1 regulasi	2450	Diskominfo

			Pemberdayaan dan pemanfaatan e-government	meningkatkan budaya pemanfaatan TIK secara cerdas kreatif dan produktif(CAKA P) untuk menguatkan karakter budaya bangsa, tersedianya fasilitas informasi pembangunan	0	0	0	1 video 2 kegiatan sosialisasi pemanfaatan TIK untuk pelajar,	1245	2 kegiatan sosialisasi pemanfaatan TIK untuk pelajar, 12 bulan fasilitas informasi pembangunan	3801	2 kegiatan sosialisasi pemanfaatan TIK untuk pelajar, 12 bulan fasilitas informasi pembangunan	380	2 kegiatan sosialisasi pemanfaatan TIK untuk pelajar, 12 bulan fasilitas informasi pembangunan	380	2 kegiatan sosialisasi pemanfaatan TIK untuk pelajar, 12 bulan fasilitas informasi pembangunan	380	1 video 8 kegiatan sosialisasi pemanfaatan TIK untuk pelajar, 12 bulan fasilitas informasi pembangunan	6186	Diskominfo
			Penyusunan standar dokumentasi dan publikasi isu-isu strategis daerah	terbentuknya SOP Dokumentasi dan publikasi isu strategis	0	0	0	0	0	1 kegiatan	150	0	0	0	0	0	0	1 kegiatan	150	Diskominfo

			Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informatika dan komunikasi	Jumlah informasi strategis dan aktual nasional melalui media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang yang diproduksi dan didesiminasikan	0	0	0	0	0	30 kegiatan desinimasi aktual nasional melalui media massa, media baru media tradisional 360 hari desiminasi melalui media baru dan 12 kegiatan media luar ruang	400	30 kegiatan desinimasi aktual nasional melalui media massa, media baru media tradisional 360 hari desiminasi melalui media baru dan 12 kegiatan media luar ruang	400	30 kegiatan desinimasi aktual nasional melalui media massa, media baru media tradisional 360 hari desiminasi melalui media baru dan 12 kegiatan media luar ruang	400	30 kegiatan desinimasi aktual nasional melalui media massa, media baru media tradisional 360 hari desiminasi melalui media baru dan 12 kegiatan media luar ruang	400	120 desiminasi, 360 desiminasi media baru, 44 ke me4 dia luar ruang	1600	Diskominfo
			Pelayanan Informasi melalui Media Online	terpenuhinya pengelolaan dan pengembangan website	1 tahun	1 tahun	10	1 tahun	20	1 tahun	50	1 tahun	50	1 tahun	50	1 tahun	50	5 tahun	230	Diskominfo

Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Data Center dan NOC standar	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Na	20	1695	40	7031	60	5910	80	6290	100	6345	100	6495		33716	Diskominfo
		Pemeringkatan E-Government Indonesia	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Terpantainya menara telekomunikasi di Kabupaten Pemalang, fasilitasi rapat bidang telekomunikasi	75	45	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 menara	25	Diskominfo
			Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	tersedianya data survei Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	0	0	0	1 kegiatan	47	1 kegiatan	50	1 kegiatan	50	1 kegiatan	50	1 kegiatan	197	Diskominfo
			Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Tersedianya peralatan studio untuk layanan multimedia		8 unit	270	0	0	2 kamera, 1 kamera Video shooting	95	1 kamera digital,	50	1 kamera shooting	50	1 kamera digital	50	3 kamera DLSR, 1 kamera shooting	515	Diskominfo

			Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Tersedianya data base SIM, bimtek/pelatihan IT,	0	0	0	0	0	1 dok	80	1 dok	100	1 dok	125	1 dok	125	4 dok	430	Diskominfo
			Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Kominfo	Tersedianya data base Renstra Kom Publik	0	0	0	0	0	2 dokumen	130	2 dok	140	2 dok	150	2 dok	150	8 dok	570	Diskominfo
			Pemeliharaan alat studio dan komunikasi	Terpeliharanya peralatan studio dan komunikasi	8 komputer, 4 kamera shooting, 4 kamera DLSR, 1 ruang studio radio	8 komputer, 4 kamera shooting, 4 kamera DLSR, 1 ruang studio radio	50	0	0	12 bulan	80	12 bulan	100	12 bulan.	120	12 bulan.	150	12 bulan	450	Diskominfo
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kominfo	pembuatan aplikasi dan pengintegrasian sistem informasi, pengadaan sarana datacenter, penambahan hotspot publik	3 paket (5 unit komputer/laptop, 1 server dan 1 aplikasi soft ware)	47 unit	600	0	0	0	0	12 bulan	200	12 bulan	200	12 bulan	200	36 bulan, 47 unit	1200	Diskominfo

			Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kominfo	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasaranan komunikasi dan tersedianya layanan internet dlm 1 tahun	1 paket	1 paket	380	0	0	0	0	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	170	4 paket	850	Disk omi nfo
			Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa	Tersedianya layanan pengadaan selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	370	1 tahun	270	1 tahun	350	1 tahun	350	1 tahun	350	1 tahun	350	5 tahun	2040	Disk omi nfo
			Penyelenggaraan ekosistem smart city	Tersedianya aplikasi dan infrastruktur untuk pemerintahan maupun publik guna mewujudkan smart city	0	0	0	10 aplikasi, 4 titik hotspot, 1 command center	3855	6 titik hotspot, bim tek smart city, fasilitasi e voting	2300	3 titik hotspot, evaluasi smart city, sosialisasi pemanfaatan hotspot, CCTV untuk pelayanan	2400	2 titik hotspot, evaluasi smart city, sosialisasi, CCTV	2400	2 titik hotspot, evaluasi smart city, sosialisasi, CCTV	2500	2 titik hotspot, evaluasi smart city, sosialisasi, CCTV	13455	Disk omi nfo
			Pengembangan dan penyelenggaraa n aplikasi berbagi pakai	Terkoneksinya aplikasi-aplikasi pemerintahan untuk mewujudkan aplikasi berbagi pakai	0	0	0	4 aplikasi, 4 pelatihan	1745	11 aplikasi terkoneksi, 8 pelatihan	1573	7 aplikasi, 7 pelatihan	1500	10 aplikasi, 10 pelatihan	1500	12 aplikasi, 12 pelatiha n	1500	5 aplika si, 4 pelati han	7818	Disk omi nfo

			Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah	Terwujudnya tata kelola domain dan sub domain pemerintahan daerah yang aman dan handal, pelatihan interoperabilitas dan interkoneksi	0	0		Pelatihan 20 website dan 2 sertifikasi keamanan, website 2	313	Pelatihan 120 website, rakor, desk website	410	Pelatihan 120 website, rakor, desk website	400	Pelatihan 120 website, rakor, desk website	400	Pelatihan 120 website, rakor, desk website	400	Pelatihan 120 website, rakor, desk website	1923	Diskominfo
			Pengelolaan infrastruktur e-government, data dan informasi terintegrasi	Terintegrasinya data dan infrastruktur komunikasi, terpustnya data base	0	0	0	Penyediaan bandwidth, tower, pemeliharaan server, pengadaan R NOC, instalasi jaringan,	848	Penyediaan bandwidth, tower, pemeliharaan server, pengadaan R NOC, peralatan e-voting instalasi jaringan,	845	Penyediaan bandwidth, tower, pemeliharaan server, pengadaan R NOC, peralatan e-voting instalasi jaringan,	850	Penyediaan bandwidth, tower, pemeliharaan server, pengadaan R NOC, peralatan e-voting instalasi jaringan FO	850	Penyediaan bandwidth, tower, pemeliharaan server, pengadaan R NOC, peralatan e-voting instalasi jaringan FO	850	Penyediaan bandwidth, tower, pemeliharaan server, pengadaan R NOC, peralatan e-voting instalasi jaringan FO	4243	Diskominfo
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	Program pengembangan persandian/informasi daerah	Persentase Informasi Pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	0	0	0	12 bulan	572	12 bulan	813	12 bulan	820	12 bulan	820	12 bulan	820	60 bulan	3845	Diskominfo

			Pengamanan komunikasi dan informasi	terwujudnya penyelenggaraan keamanan informasi	0	0	0	12 bulan	180	12 bulan	270	12 bulan	270	12 bulan	270	12 bulan	270	60 bulan	1260	Diskominfo
	Terintegrasi data seluruh SKPD/OPD	Ketersediaan data Statistik Terintegrasi	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah		6 dok	6 dok	200	6 dok	232	6 dok	885	6 dok	950	6 dok	950	6 dok	950	6 dok	4167	Diskominfo

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA RPJMD

Penetapan Indikator Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang harus mendukung program prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator Kinerja yang menjadi acuan dan penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD Kabupaten Pemalang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1
Indikator yang akan dicapai Dinas
Komunikasi dan Informatika berdasarkan program prioritas RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikasi sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas jaringan telekomunikasi dan Informatika guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	Titik Hot spot	Na	3	6	9	12	14	14

Tabel 6.2
Indikator yang akan dicapai Dinas
Komunikasi dan Informatika berdasarkan program RPJMD

No	Bidang Urusan/ Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Fokus Layanan Urusan Wajib									
Komunikasi dan Informatika									
10.2	Tersedianya Data Center	5	20	40	60	80	80	100	100
10.2	Cakupan Layanan BTS	70	75	85	90	95	95	100	100
10.3	Jumlah penyiaran radio/jumlah pengawasan isi siaran radio	10	11	11	11	11	11	11	11
10.4	Prosentase SKPD telah memiliki website (%)	10	20	40	56	72	84	84	100
10.5	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional melalui:								
	- media Massa,	1	1	1	1	1	1	1	1
	- media baru (on line),	4	4	4	4	4	4	4	4
	- Media Tradisional,	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Media Interpersonal	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Media Luar Ruang	3	3	3	3	3	3	3	3
10.6	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Pematang	10	11	12	13	14	15	15	16

STATISTIK									
Jumlah Dokumen Kabupaten Pemalang Dalam Angka	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Dokumen Kecamatan Dalam Angka	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Dokumen PDRB Kabupaten Pemalang	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Dokumen PDRB Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Dokumen Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kabupaten Pemalang	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Dokumen NTP Kabupaten Pemalang	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PERSANDIAN									
Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	100	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB VII

PENUTUP

Untuk dapat mencapai target kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menyusun Renstra PD 2016-2021. Renstra PD 2016-2021 memuat Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan Pembangunan dan Indikator Kinerja, serta Pendanaannya.

Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing bidang diharapkan Renstra PD 2016-2021 dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang yang menjadi acuan keberhasilan suatu PD dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan

- a) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Diskominfo Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
- b) Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
- c) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

d) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021 sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

Demikian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dinas, Selanjutnya dapat menjadi salah satu pencapaian RPJMD Kabupaten Pemalang.

Selain hal tersebut Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat menjadi referensi keberhasilan pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 17 April 2017

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG**



Drs. NUGROHO BUDI RAHARJO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610821 198903 1 001